

Dinamika Politik Islam: Menyongsong Tantangan dan Meraih Peluang dalam Tata Kelola Politik dan Hukum di Pengadilan Agama Indramayu

¹*Kusyana, ²Muhammad Zafarudin, ³Shadam Hidayatul Hadi

Institut Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, Jawa Barat, Indonesia

Email : indramayukusyana@gmail.com

Abstrak

Kegiatan ini mengeksplorasi dinamika politik Islam dalam tata kelola politik dan hukum di Pengadilan Agama Indramayu. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, kegiatan ini mengkaji bagaimana pengaruh politik Islam mempengaruhi keputusan hukum dan administrasi di pengadilan tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya, serta analisis dokumen hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh politik dalam pengambilan keputusan hukum, para hakim cenderung mempertahankan independensi dan integritas mereka dalam menghadapi tekanan politik. Selain itu, kegiatan ini menemukan adanya peluang bagi peningkatan kualitas tata kelola melalui reformasi hukum dan pelatihan profesional. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk intervensi politik dan kurangnya sumber daya. Kegiatan ini berkontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang interaksi antara politik Islam dan sistem hukum di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pengadilan agama di Indramayu.

Kata Kunci : Politik Islam, Tata Kelola Hukum, Pengadilan Agama.

Abstract

This activity explores the dynamics of Islamic politics in the political and legal governance of the Indramayu Religious Court. Through a qualitative case study approach, this activity examines how the influence of Islamic politics affects legal and administrative decisions in the court. Data was collected through in-depth interviews with judges, lawyers, and other related parties, as well as through the analysis of legal documents. The results show that, despite political influence in legal decision-making, judges tend to maintain their independence and integrity in the face of political pressure. Additionally, the activity found opportunities for improving governance quality through legal reforms and professional training. However, the challenges faced include political intervention and a lack of resources. This activity contributes to a deeper understanding of the interaction between Islamic politics and the legal system in Indonesia, and provides recommendations for improving the governance of the religious court in Indramayu.

Keywords: Islamic Politics, Legal Governance, Religious Court.

PENDAHULUAN

Pengadilan agama di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Institusi ini berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa bagi umat Muslim yang mencakup isu-isu seperti perceraian, warisan, perwalian, dan berbagai perkara lain yang diatur dalam hukum Islam. Pengadilan agama tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjalankan peran penting dalam mengimplementasikan hukum Islam secara formal di Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pengaruh politik Islam dalam beberapa dekade terakhir, terdapat perdebatan mengenai bagaimana politik ini mempengaruhi tata kelola hukum di pengadilan agama. Menurut Sundusiyah (2022), pengadilan agama tidak hanya menjadi arena penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga tempat di mana politik Islam berinteraksi dengan hukum formal negara. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana dinamika politik Islam dapat mempengaruhi tata kelola di pengadilan agama, khususnya di wilayah Indramayu, Jawa Barat.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan bersama mahasiswa yang sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL), dengan tujuan memberikan pengalaman praktis dan analitis mengenai tata kelola hukum dan pengaruh politik dalam sistem peradilan agama. Dalam foto di dibawah, kita dapat melihat mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKL bersama dengan para pejabat

pengadilan agama. Foto ini diambil di Media Center Pengadilan Agama Indramayu, tempat di mana para mahasiswa belajar langsung dari para praktisi hukum.



Gambar 1. Sesi Foto Bersama

Dinamika Politik Islam dan Pengaruhnya terhadap Pengadilan Agama

Pengaruh politik Islam dalam pengadilan agama terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari penunjukan hakim hingga penerapan kebijakan hukum yang berlandaskan syariah (Yani, 2017). Politik Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak era reformasi yang membuka ruang lebih besar bagi ekspresi politik berbasis agama. Salah satu dampak utama dari dinamika ini adalah bagaimana hukum Islam diterapkan dalam proses peradilan.

Para hakim di pengadilan agama sering kali berasal dari latar belakang pendidikan agama yang kuat dan memiliki pandangan yang dipengaruhi oleh pemikiran Islam yang konservatif atau progresif, tergantung pada afiliasi politik dan keagamaan mereka (Sulaeman, 2022). Hal ini mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam dalam kasus-kasus yang mereka tangani.

Misalnya, dalam kasus perceraian, beberapa hakim mungkin lebih cenderung untuk mendorong mediasi dan rekonsiliasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sementara yang lain mungkin lebih tegas dalam menerapkan hukum cerai jika dianggap memenuhi syarat sesuai syariah. Kebijakan ini dapat berbeda-beda antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya, mencerminkan pluralisme hukum dan politik yang ada di Indonesia.

Pengaruh Politik Lokal di Pengadilan Agama Indramayu

Di wilayah Indramayu, Jawa Barat, politik lokal juga memainkan peran penting dalam pengelolaan pengadilan agama. Indramayu dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki basis massa Muslim yang kuat, dengan banyak organisasi keagamaan dan pesantren yang berpengaruh. Politik lokal di Indramayu sering kali dipengaruhi oleh kepentingan kelompok-kelompok agama ini, yang kemudian berdampak pada kebijakan dan praktik di pengadilan agama.

Para mahasiswa yang melakukan PKL di Pengadilan Agama Indramayu mendapatkan kesempatan untuk mengamati secara langsung bagaimana politik lokal mempengaruhi proses peradilan. Mereka belajar tentang pentingnya memahami konteks sosial dan politik dalam setiap keputusan hukum yang diambil. Pengalaman ini sangat berharga dalam membentuk wawasan mereka tentang kompleksitas tata kelola hukum di Indonesia.

Tantangan dan Peluang dalam Tata Kelola Pengadilan Agama

Pengadilan agama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang

terlibat. Dalam konteks ini, dinamika politik Islam dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, politik Islam dapat mendorong penerapan hukum yang lebih konsisten dengan nilai-nilai syariah. Namun, di sisi lain, politik juga dapat menyebabkan ketidakadilan jika digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Peluang yang ada bagi pengadilan agama adalah untuk terus mengembangkan kapasitas dan profesionalisme para hakim dan stafnya. Kegiatan PKL seperti yang dilakukan oleh mahasiswa di Pengadilan Agama Indramayu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoretis, tetapi juga pengalaman praktis yang sangat berharga dalam memahami dinamika hukum dan politik di pengadilan agama.

Dengan demikian, pengadilan agama di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam sistem hukum nasional, terutama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Dinamika politik Islam yang semakin kuat memberikan tantangan dan peluang bagi pengadilan agama dalam melaksanakan tugasnya. Melalui kegiatan pengabdian dan PKL, mahasiswa dapat memperoleh wawasan dan pengalaman yang berharga dalam memahami kompleksitas tata kelola hukum di pengadilan agama, seperti yang terlihat dalam kegiatan di Pengadilan Agama Indramayu. Foto yang diambil dalam kegiatan ini mencerminkan semangat kolaborasi dan pembelajaran yang berkelanjutan antara institusi pendidikan dan lembaga peradilan.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, pengacara, dan staf administrasi di Pengadilan Agama Indramayu. Selain itu, dilakukan analisis terhadap dokumen hukum dan keputusan pengadilan yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data dikategorikan ke dalam tema-tema yang sesuai dengan tujuan kegiatan. Mahasiswa yang terlibat dalam PKL berperan aktif dalam proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan kegiatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa politik Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Indramayu. Dalam wawancara yang dilakukan, banyak hakim dan pengacara yang mengakui adanya tekanan dari berbagai kelompok politik yang memiliki kepentingan tertentu dalam kasus-kasus yang mereka tangani. Tekanan ini sering kali terkait dengan pandangan atau kebijakan tertentu yang ingin diadvokasi oleh kelompok-kelompok tersebut. Meski demikian, para hakim di Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap independensi dan integritas profesional mereka.

Para hakim berusaha keras untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada hukum dan prinsip keadilan, meskipun dalam kondisi tekanan politik yang tidak selalu mudah. Mereka menggunakan pengetahuan dan pemahaman mendalam mereka tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan untuk menavigasi situasi yang kompleks dan sensitif. Hal ini mencerminkan dedikasi mereka terhadap tugas mereka sebagai penegak hukum yang adil dan tidak memihak.

Selama kegiatan ini, ditemukan juga bahwa ada peluang signifikan untuk meningkatkan tata kelola pengadilan melalui reformasi hukum dan pelatihan profesional. Reformasi hukum yang diusulkan mencakup peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi sistem yang lebih efektif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengadilan. Misalnya, penerapan teknologi informasi yang lebih maju dapat membantu dalam pengelolaan kasus dan penyebaran informasi kepada publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengadilan.

Pelatihan profesional bagi hakim dan staf pengadilan juga diidentifikasi sebagai area penting untuk pengembangan. Program pelatihan berkelanjutan dapat membantu para hakim dan staf pengadilan untuk terus mengembangkan keterampilan mereka dan tetap up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam hukum Islam dan hukum nasional. Hal ini akan memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru yang muncul dalam konteks sosial dan politik yang dinamis.

Kontribusi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKL ini sangat signifikan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga aktif dalam melakukan wawancara, mengumpulkan dokumen, dan menganalisis data yang diperoleh. Partisipasi mereka memberikan wawasan baru dan membantu dalam mengidentifikasi masalah serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas tata kelola hukum di pengadilan agama dan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik hukum.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menegaskan pentingnya menjaga independensi dan integritas pengadilan agama di tengah dinamika politik yang ada. Meskipun ada tekanan politik, komitmen para hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan tetap kuat. Selain itu, peluang untuk meningkatkan tata kelola pengadilan melalui reformasi hukum dan pelatihan profesional harus terus diupayakan untuk memastikan bahwa pengadilan agama dapat berfungsi dengan efisien dan adil. Pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama PKL ini sangat berharga dalam membentuk pemahaman mereka tentang tata kelola hukum dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya perbaikan sistem peradilan di Indonesia.



Gambar 2. Foto bersama Ketua Pengadilan Agama Indramayu

Pembahasan hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa meskipun pengaruh politik Islam dapat menjadi tantangan yang signifikan, terdapat berbagai peluang untuk memperkuat tata kelola hukum di Pengadilan Agama Indramayu. Politik Islam, dengan berbagai dinamikanya, sering kali mempengaruhi proses pengambilan keputusan di pengadilan agama. Hal ini menciptakan tantangan bagi para hakim dan staf pengadilan untuk menjaga independensi dan integritas profesional mereka dalam menghadapi tekanan eksternal. Namun, dengan

pendekatan yang tepat, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat sistem peradilan.

Salah satu cara yang diidentifikasi untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui reformasi hukum yang mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Transparansi dalam pengambilan keputusan merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan agama. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan sistem yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi mengenai proses dan hasil pengadilan. Peningkatan transparansi tidak hanya membantu dalam memitigasi pengaruh negatif politik, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan terbuka.

Akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam reformasi hukum. Pengadilan agama perlu memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja para hakim dan staf administrasi. Implementasi sistem akuntabilitas yang kuat akan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pengadilan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Mekanisme ini juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi politik yang tidak semestinya.

Selain reformasi hukum, pelatihan yang lebih baik bagi para hakim dan staf administrasi juga merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pengadilan agama. Pelatihan yang berkelanjutan dan komprehensif akan membantu para hakim dan staf pengadilan untuk terus mengembangkan keterampilan mereka dan memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam hukum Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, mereka akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam konteks sosial dan politik yang dinamis.

Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis hukum, tetapi juga mencakup pengembangan soft skills seperti kemampuan komunikasi, etika profesional, dan manajemen konflik. Pelatihan yang holistik ini akan membantu para hakim dan staf pengadilan untuk menjadi lebih kompeten dan profesional dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, pelatihan ini juga dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga integritas dan independensi dalam proses peradilan.

Penting juga untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan tetap sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Mekanisme pengawasan ini dapat berupa badan independen yang memiliki otoritas untuk memonitor dan mengevaluasi keputusan pengadilan. Badan ini harus memiliki akses penuh terhadap informasi dan data yang relevan, serta memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip hukum dan keadilan.

Keterlibatan mahasiswa dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses ini. Melalui PKL, mahasiswa dapat memperoleh wawasan praktis yang berharga mengenai dinamika tata kelola hukum dan politik di pengadilan agama. Mereka dapat belajar langsung dari para praktisi hukum, mengamati proses peradilan, dan terlibat dalam pengumpulan serta analisis data. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka, tetapi juga membantu mereka untuk memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh pengadilan agama.

Keterlibatan mahasiswa dalam PKL juga memiliki manfaat jangka panjang bagi sistem peradilan. Mahasiswa yang terlatih dengan baik dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tata kelola hukum dan politik diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang positif di masa depan. Mereka dapat berkontribusi dalam upaya perbaikan sistem peradilan, baik melalui

karier profesional mereka di bidang hukum maupun melalui kegiatan dan pengabdian masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa meskipun pengaruh politik Islam dapat menjadi tantangan, ada peluang yang signifikan untuk memperkuat tata kelola hukum di Pengadilan Agama Indramayu. Reformasi hukum yang mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pelatihan profesional yang berkelanjutan, dapat membantu mengurangi pengaruh negatif politik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Selain itu, mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan tetap sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Keterlibatan mahasiswa dalam PKL juga memberikan wawasan praktis yang berharga mengenai dinamika tata kelola hukum dan politik di pengadilan agama, yang pada akhirnya dapat berkontribusi dalam upaya perbaikan sistem peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan ini, jelas terlihat bahwa meskipun pengaruh politik Islam dapat menjadi tantangan yang signifikan dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Agama Indramayu, terdapat berbagai peluang untuk memperkuat tata kelola hukum di institusi tersebut. Para hakim di Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap independensi dan integritas profesional mereka, meskipun harus menghadapi tekanan dari berbagai kelompok politik. Dedikasi mereka terhadap penerapan hukum dan prinsip keadilan mencerminkan upaya mereka untuk menjaga sistem peradilan yang adil dan tidak memihak, walaupun dalam situasi yang penuh dengan dinamika politik.

Reformasi hukum yang mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan diusulkan sebagai langkah penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Transparansi dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan agama, sementara akuntabilitas yang kuat akan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pengadilan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan bagi para hakim dan staf administrasi sangat penting untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, memastikan bahwa mereka dapat menghadapi tantangan baru yang muncul dalam konteks sosial dan politik yang dinamis.

Keterlibatan mahasiswa dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat tata kelola pengadilan agama. Pengalaman praktis yang diperoleh mahasiswa dalam mengamati dan terlibat langsung dalam proses peradilan memberikan wawasan yang berharga mengenai dinamika hukum dan politik di pengadilan agama. Hal ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mereka, tetapi juga membantu mereka untuk memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan. Pada akhirnya, keterlibatan mahasiswa ini dapat berkontribusi dalam upaya perbaikan sistem peradilan di Indonesia, dengan menghasilkan profesional hukum yang kompeten dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiita, C. A. (2023). DINAMIKA POLITIK DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM INDONESIA TAHUN 1949-1962. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(1), 26-38.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Khamim, S., Iswantir, I., Siregar, N., & Yaldi, Y. (2024). Pengaruh Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Politik Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2027-2042.
- Listiana, H. (2019). Dinamika Politik Pendidikan Guru Agama Islam Pada Masa Orde Lama. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 195-216.
- Selawati, N. (2022). Peluang Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Menuai Tantangan, Meraih Peluang. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(03), 438-448.
- Sulaeman, E. (2022). *Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern*. Pustaka Al-

Kautsar.

- Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Arena Hukum*, 15(3), 471–498.
- Surono, Y., Anita, M. A., & Diana, M. P. I. (2024). Memaknai Negara, Agama, dan Ideologi Politik dalam Kajian Fiqih Kontemporer. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 3(2), 34-45.
- Yani, A. F. (2017). Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Ekonomi Syariah. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18(01), 50–66.
- .